

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki pemandangan yang sangat indah, bentangan pulau dari Sabang hingga Merauke menjadikan Indonesia negara yang luas dan terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, selain itu Indonesia juga terletak diantara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis negara Indonesia yang memiliki tingkat strategis yang tinggi memberi keuntungan yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa. Oleh sebab itu menyebabkan Indonesia masuk menjadi salah satu negara yang sering dilewati dalam jalur perdagangan, sehingga Indonesia mudah dikenal di negara-negara lain. Hal itu sangat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia yang terus bertumbuh seiring dengan bertambahnya pendapatan nasional yang meningkat secara signifikan dan memberikan dampak yang besar untuk masyarakat. Ekonomi menjadi salah satu cara untuk menolak ukur kemakmuran suatu negara. Salah satu penunjang ekonomi yang paling besar adalah di bidang kepariwisataan. Dengan jutaan keindahan alam, kultur, budaya, dan warisan leluhur yang masih asli menjadi nilai lebih yang sangat diunggulkan. Dengan segala keindahan yang disungguhkan Indonesia menjadi destinasi wisata yang diperhitungkan di dunia.

Objek wisata di Indonesia harus bersiap dalam melakukan perbaikan untuk membuat suatu terobosan baru yang unik dan memiliki ciri khas yang nantinya

dapat dijual dan dinikmati oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara. Berbagai ragam dan macam dalam upaya bersiap-pembenahan seperti, daerah yang memiliki potensi keindahan alam dapat memfokuskan pembenahan ke wisata alam, kawasan yang memiliki makna tinggi sejarah signifikansi atau peninggalan penjajahan di masa lalu dapat dikonsentrasikan pada wisata kota tua; demikian pula daerah yang berkonsentrasi dengan tempat ibadah yang besar maka dapat berkonsentrasi pada wisata religi; dan daerah yang memiliki beragam pilihan kuliner dapat lebih konsentrasi pada wisata kuliner. Ini adalah beberapa contoh berbagai jenis pariwisata yang ditawarkan di Indonesia. Pengembangan pariwisata melibatkan sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya pariwisata yang berbeda dengan semua kawasan non pariwisata yang masih memiliki hubungan secara langsung atau tidak langsung yang akan mempengaruhi keberlanjutan pariwisata. Industri yang menunjang pendapatan asli daerah dan berperan penting dalam pembangunan perekonomian daerah adalah kepariwisataan. Istilah pariwisata mengacu pada semua kegiatan terkait interdisipliner dan bersifat multidimensi. Mereka muncul dari tuntutan masing-masing individu dan bangsa serta dari interaksi antara wisatawan dan wisatawan lain, otoritas lokal dan wisatawan, dan otoritas lokal, wisatawan dan dengan pemilik usaha.

Pariwisata adalah salah satu industri yang sangat mendukung pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu saat ini promosi wisata dilakukan lebih maksimal oleh pemerintah. Sebab pada kenyataannya pariwisata memiliki pengaruh yang besar untuk negara. Pariwisata memainkan peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Dampak yang paling menonjol dari sektor pariwisata adalah pada

ekonomi yang signifikan karena dapat menyumbangkan devisa negara yang tinggi. Selain berpotensi mengangkat perekonomian, pariwisata juga menghadirkan strategi yang menarik untuk menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Pariwisata adalah komponen ekonomi nasional yang diharapkan memiliki dampak yang signifikan pada penduduk setempat, terutama mereka yang tinggal di lokasi atau tempat yang merupakan tujuan wisata populer. Karena kemampuannya untuk mempertahankan ekonomi nasional selama masa-masa kritis, pariwisata telah dan akan terus menjadi fokus utama pembangunan daerah baik untuk pemerintah daerah maupun pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata menyatakan “bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global”.¹ Nilai-nilai yang ada itu dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sekaligus menjadi ciri khusus dari bangsa lain, yang akan memberikan pola (patroon) untuk menentukan sikap, tingkah laku serta perbuatan bangsa Indonesia.²

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang terus berupaya memperluas kawasan pariwisatanya. Kabupaten Temanggung memiliki batas administratif sebagai berikut : terletak di Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang disebelah utara; Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang berbatasan disebelah timur; Kabupaten Magelang disebelah selatan; dan Kabupaten Wonosobo berbatasan disebelah barat. Kawasan Kabupaten

¹ Program Studi and others, ‘Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisatahan Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan’, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (2021), 163–72.

² Binov Handitya, ‘Membangun Karakter Pancasila Dalam Menghadapi Era Society 5.0’, *Jurnal Pancasila*, 2.2 (2021), 45–58

Temanggung secara geokonomis dilewati oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang, Provinsi Yogyakarta, dan Purwokerto. Secara geomorfologi, Temanggung termasuk daerah yang unik dan beranekaragam kekayaan alam mulai dari dataran, perbukitan, pegunungan, lembah dan gunung. Temanggung memiliki dua buah gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing.³ Oleh karena itu Temanggung memiliki pemandangan alam yang sangat indah sehingga sangat menarik dijadikan destinasi wisata. Diantaranya seperti Sibajag Green Canyon, Umbul dan Pinus Jumprit, Candi dan Kolam Renang Alam Liyangan, Posong, Embung Kledung, Embung Bansari, Curug Lawe, Curug Surodipo, Monumen Meteorit dan sebagainya. Dengan adanya potensi wisata yang sangat unggul diharapkan kabupaten Temanggung dapat terus menarik wisatawan untuk berkunjung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, “yang diantaranya mengatur kewenangan daerah seperti pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola rumah tangga mereka sendiri”. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengikuti kerangka pembangunan guna memaksimalkan potensi pariwisata masing-masing. Meskipun pemerintah pusat masih bertanggungjawab untuk mengelola beberapa aspek pariwisata, beberapa destinasi wisata telah dibangun mandiri oleh pemerintah daerah. Meskipun sebagian besar harus sampai ke daerah untuk memimpin dalam mengembangkan pariwisata, pemerintah pusat harus memiliki tanggungjawab dan

³ Tim Redaksi, ‘Sekilas Temanggung’, *Media Center Temanggung*, 2023 <<https://mediacenter.temanggungkab.go.id/halaman/detail/sekilas-temanggung>> [accessed 23 September 2023].

kekuatan untuk melakukannya. Namun, inisiatif pemerintah daerah untuk berkembang sangat dibutuhkan dalam hal ini.

Dalam upaya pembangunan dan pengembangan Kawasan pariwisata di Kabupaten Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung membuat peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025. Pembentukan peraturan ini bertujuan untuk “Menyusun arah pengembangan serta konsep, kebijakan dan rencana strategis yang akan menjadi dasar pengembangan pariwisata daerah; menyiapkan arah, strategi, dan pola keterpaduan pengembangan pemasaran dan kelembagaan pariwisata daerah; dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata kawasan yang meliputi daya tarik, usaha sarana wisata, usaha jasa wisata dan usaha lain pendukung pariwisata”. Dengan adanya kepastian hukum diharapkan dapat menunjang kepariwisataan di Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan ini, karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD biasanya mengalokasikan sedikit untuk pariwisata, pemerintah daerah tidak dapat menolak permintaan pendanaan untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata. Ketika ada bukti di beberapa lokasi mengenai sumber daya yang tidak memadai untuk pemeliharaan tempat-tempat wisata, maka wisatawan cenderung beramsumsi bahwa perawatan di objek wisata terlihat buruk. Oleh karena itu, pemerintah harus mengidentifikasi dan melakukan pemetaan kebutuhan dan kepentingan untuk memaksimalkan kemanfaatan. Kegiatan ini akan meningkatkan geliat ekonomi di sekitarnya, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, menciptakan produk unggulan dan daya saing. Acuannya adalah komitmen

terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan dan konsisten dengan penciptaan tempat-tempat wisata baru dan juga melakukan pembaharuan untuk objek wisata terdahulu. Salah satu penjelasan utama adalah bahwa karena setiap daerah memiliki kualitas yang berbeda dan memiliki karakteristik pariwisata cenderung unik, fokus pariwisata dapat bergerak di sekitar wilayah tersebut. Adat budaya, kuliner, norma sosial, dan kearifan lokal adalah beberapa contoh faktor yang dapat membuat suatu inovasi yang unik. Dengan kata lain kemampuan untuk mengemas, membranding, dan menjual daya tarik wisatanya sesuai dengan komitmen daerah terhadap semua potensi yang ada. Pemetaan potensi wisata secara tidak langsung membutuhkan pengembangan terus-menerus mata rantai industri kuliner dan cinderamata, yang masing-masing dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Bahkan hal ini dapat berdampak pada munculnya produk unggulan baru dan daya saing di wilayah yang sebanding.⁴

Berdasarkan Pasal 11, 12, 13 Peraturan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 sudah diatur secara jelas bagaimana aturan dalam pembangunan daya tarik wisata. Dalam hal ini bagaimana langkah pemerintah daerah untuk terus dapat bersaing untuk terus meningkatkan minat masyarakat. Pengembangan objek dan daya tarik diuraikan dengan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan budaya yang berpotensi dan berdaya tarik bagi

⁴ Edi Purwo Saputro, 'Pemetaan Potensi Wisata', *Investor.Id*, 2018 <<https://investor.id/opini/172990/pemetaan-potensi-wisata>> [accessed 9 March 2021].

wisatawan. Tersedianya objek dan daya tarik menggambarkan syarat yang harus tersedia dalam pengembangan pariwisata.⁵

Diharapkan bahwa pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat dalam hal pendanaan, manajemen, dan penerimaan. Pendapatan Asli Daerah atau PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan ekonomi lokal, menurunkan pengangguran, dan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Pemerintah harus berkolaborasi dengan pengelola untuk mengembangkan dan memfasilitasi tempat pariwisata jika mereka ingin pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Perkembangan pariwisata dapat berdampak pada berbagai aspek seperti sosial dan ekonomi masyarakat.⁶ Kepariwisataan merupakan pilar dari pembangunan daerah karena berkontribusi pada PAD, menarik investor dan tenaga kerja, serta pengembangan wilayah.⁷

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak yang sangat positif untuk masyarakat sekitar. Namun selain itu juga memiliki efek yang tidak menguntungkan, dampak negatifnya antara lain seperti kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya lokal yang tidak terkendali, penurunan peran masyarakat setempat, dan persaingan bisnis yang membahayakan ekonomi, budaya, dan lingkungan sekitar lokasi. Tentu langkah pemerintah daerah harus diperhatikan dan

⁵ Putu Eka Wirawan i Nyoman Sudiarta, *Daya Tarik Wisata Jogging Track* (Bali: Nilacakra, 2018)

⁶ Stefen Yustinus Aneldus and Made Heny, 'Pengaruh Sektor-Sektor Pariwisata Terhadap Kabupaten Manggarai Barat', *Ekonomi Pembangunan Unud*, 2018, 1603–30.

⁷ Aris Hardinanto hasanah, Uswatun, ahmas Irsyadmunir, *Strategi Pemerintah Daerah Di Madura Dalam Pembangunan Kelembagaan Melalui Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata* (Scopindo, 2021)

dibenahi dalam kegiatan pariwisata dan mengedepankan aspek konversi alam, aspek sosial budaya, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, serta bagian pembelajaran dan pendidikan.⁸ Pemerintah daerah harus mampu memainkan peran penting dalam memaksimalkan pertumbuhan budaya dan pariwisata nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, memberantas kemiskinan, dan menyeimbangkan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.⁹

Identifikasi isu-isu strategi pengembangan kawasan pariwisata tentunya sangatlah penting karena dapat membantu dalam menentukan arah dalam pengembangan Kawasan pariwisata yang tepat dan efektif. Dalam proses identifikasi isu-isu strategi tersebut, akan ditentukan masalah masalah yang dihadapi oleh kawasan pariwisata, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan pariwisata serta peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan pariwisata.¹⁰

Penelitian terdahulu sudah membahas mengenai peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam pengembangan objek wisata dalam hal ini peneliti mengembangkan penelitian sebelumnya agar jangkauan pariwisata dapat lebih luas dengan dapat meningkatkan pendapat asli daerah dan dapat menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian hukum

⁸ Manahati Zebua, *Inspirasi Pengembangan Pariwisata Daerah*, Edisi Revi (Jakarta: Deeplublish, 2016)

⁹ Maya Panorama, *Potensi Ekonomi Wisata Religi Di Kota Palembang* (Palembang: Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI, 2017)

¹⁰ Vitayanti Fattah Suparman, Muzakir, *Ekonomi Pariwisata* (Jakarta: Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI 611/DKI/2022, 2023)

ini memilih judul penelitian : TINJAUAN YURIDIS REGULASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEMANGGUNG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat di tarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penerapan pemetaan kawasan pariwisata di Kabupaten Temanggung ?
2. Bagaimana kawasan pariwisata di daerah dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat ?
3. Apa hambatan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Temanggung ?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum
 - a. Mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam penerapan pemetaan kawasan pariwisata di Kabupaten Temanggung
 - b. Menjelaskan kawasan pariwisata di daerah dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Mengetahui hambatan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Temanggung

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran kewenangan pemerintah daerah dalam penerapan pemetaan kawasan pariwisata di Kabupaten Temanggung.
- b. Mengetahui kawasan pariwisata di daerah dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mengetahui hambatan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Temanggung.
- d. Menganalisis gambaran kewenangan pemerintah daerah dalam penerapan pemetaan kawasan pariwisata di Kabupaten Temanggung.
- e. Menganalisis kawasan pariwisata di daerah dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menganalisis hambatan pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Temanggung

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Peneliti dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai regulasi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan pariwisata guna meningkatkan pendapat asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga setelah melakukan penelitian peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai prasyarat untuk menempuh gelar sarjana hukum Universitas Ngudi Waluyo

- b. Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wilayah lainnya bagaimana regulasi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan pariwisata guna meningkatkan pendapat asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sebagai bahan bacaan mengenai regulasi pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan pariwisata guna meningkatkan pendapat asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangsih pada pengembangan pariwisata daerah.